

ABSTRAK

Nama: Li Nasihah, Nim : 121300567 judul kripsi : Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Tentang Pemalsuan Merek Ditinjau Dari Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (studi komparatif).

Merek merupakan tanda pembeda bagi masing-masing produk barang atau jasa, sehingga terhadap barang dan atau jasa dapat dibedakan kualitas barang. merek merupakan salah satu wujud karya hak kekayaan intelektual yang sering kali dijadikan sasaran pemalsuan dan tiruan oleh para pelaku usaha tindak pidana kejahatan khususnya dibidang merek. Perlindungan hukum atas merek hanya terbatas pada merek terdaftar yang sifatnya eksklusif hanya diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar

Dari uraian diatas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 1) bagaimana perspektif fatwa MUI terhadap Hak Kekayaan Intelektual, 2) bagaimana sanksi menurut Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 terhadap pemalsuan Merek. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui bagaimana perspektif Fatwa MUI terhadap Hak Kekayaan Intelektual. 2) untuk mengetahui bagaimana sanksi dari Fatwa MUI dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 terhadap pemalsuan Merek.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku ilmiah dan sumber-sumber lainnya yang ada korelasinya dengan penelitian ini. Kemudian data-data tersebut diklasifikasikan menurut dengan masalahnya masing-masing. selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat komparatif, yaitu membandingkan sesuatu data yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa Hak kekayaan intelektual adalah hasil dari kreativitas manusia yang diakui oleh masyarakat untuk dimanfaatkan dalam persaingan usaha, seperti dalam Merek. Tetapi jika adanya pelanggaran dalam memalsukan merek seperti meniru, menjiplak, memakai, menjual atau mengedarkan merek tersebut akan dikenakan sanksi, jika dalam Fatwa MUI tidak ada sanksi hanya ada dalam hukum pidana islam termasuk dalam jarimah pencurian yaitu ta'zir, tetapi dalam Undang-Undang akan dikenakan sanksi dalam pasal 90 dan dalam pasal 91.